

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain selain di Indonesia. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan. Desentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama dibidang perekonomian daerah itu sendiri.¹

Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang Negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

¹ Jati Wasisto Raharjo. 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.

otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²

Persoalan pembangunan daerah otonom dapat dilihat dari sebuah kinerja dapat dilihat dari sebuah indeks kualitas manusia yang mampu diukur secara nyata sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri, klasifikasi dari indeks keseluruhan atau universal ini mampu diukur secara tingkat kualitas manusia suatu bangsa meliputi pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan daerah otonom. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Otonomi daerah memiliki peran sangat penting terutama dalam hal mengatur wilayah secara mandiri berdasarkan karakteristik lingkungan hidupnya masing-masing. Karakteristik lingkungan hidup satu wilayah dengan wilayah lain tentu memiliki perbedaan terutama pada segi geografisnya. Otonomi memiliki kaitan erat dengan karakteristik pembangunan, yang menjadi parameter akan pembangunan berkelanjutan.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) , lahir sekitar tahun 1970 seiring dengan merebaknya masalah lingkungan. Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan pentingnya lingkungan hidup, mendorong beberapa negara untuk mengadakan pertemuan dan membahas tentang kerusakan lingkungan yang terjadi. Laporan dari *Club of Rome*, dengan menggunakan data statistik, menyimpulkan bahwa “bila tren pertumbuhan penduduk, industrialisasi, polusi, produksi makanan, dan deplesi sumberdaya terus menerus tidak berubah, maka batas pertumbuhan atas planet bumi akan dicapai dalam waktu kurang dari 100 tahun.” Namun demikian ramalan ini tidak terbukti. Ada lima komponen yang perlu diperhatikan dalam strategi pembangunan berkelanjutan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.³

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pembangunan dilakukan seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan atas dasar kemandirian dengan segenap potensi yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

³ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis. 2018. Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Strategi pembangunan manusia dan perspektif ekonomi lokal. Skripsi.

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.⁴

Salah satu bidang pembangunan ekonomi dimaksud adalah bidang pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik.⁵

Pariwisata merupakan sumber pendapatan harus diperbaharui dan diremajakan, bentuk peremajaan yang dapat dilakukan berupa renovasi, dan perawatan secara teratur, oleh sebab itu maka pariwisata merupakan investasi yang penting pada sektor non migas bagi Indonesia. Pariwisata merupakan investasi bidang ekonomi untuk masa depan akan secara otomatis mempermudah perputaran barang dan jasa pelayanan di tempat wisata. Selain itu pariwisata juga meningkatkan stabilitas ekonomi, namun tentu saja keberhasilan dalam pengembangan pariwisata seperti di atas akan mampu dirasakan jika faktor pendukung kegiatan pariwisata telah dipersiapkan dengan baik.

⁴ Laurensius Arliman S. 2018. Peran investasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi bidang pariwisata di provinsi Sumatera Barat.

⁵ Arliman Laurensius. 2018. Peran investasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi bidang pariwisata di provinsi Sumatera Barat.

Pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk penambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negative. Maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan *sustainable tourism* sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber – sumber atau asset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi dimasa depan.⁶

Sedangkan pariwisata berkelanjutan sendiri adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan. Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi social ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ekowisata menurut *International Ecotourism Society* adalah perjalanan yang

⁶ Rina Kurniawati. Modul pariwisata berkelanjutan.

bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pariwisata merupakan sebuah bisnis jangka panjang yang erat kaitannya dengan pertumbuhan perekonomian. Sebuah industri dengan pengembangan di berbagai sektor dan investor menjadikan pariwisata bisnis yang menjanjikan saat ini. Pengembangan Pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya Pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Menurut Swarbrooke terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu :

1. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi.
2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya digunakan sebagai atraksi.
3. Pembangunan baru, secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru.
4. Pembangunan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatkan pengeluaran sekunder oleh pengunjung.

5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.⁷

Penelitian yang relevan terkait judul peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Novena Ulita Napitupulu (Universitas Mercu Buana Jakarta) dengan judul “Strategi pemasaran pariwisata budaya Mentawai melalui produk kesenian muturuk.” Hasil penelitian yaitu Upaya meningkatkan permintaan angka kunjungan wisatawan pariwisata budaya ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemerintah daerah membutuhkan suatu kebijakan yang mengarah pada manajemen pemasaran. Harapannya melalui manajemen pemasaran itu dapat memberikan strategi dalam pengelolaan demi meningkatkan permintaan kunjungan pada pariwisata budaya tersebut.⁸

Selanjutnya penelitian dari Viki Priwijaya (Studi Ilmu Pemerintahan) dengan judul “*Strategi pembangunan pariwisata pasca gempa di kecamatan sembalun kabupaten Lombok Timur.*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembagunan pariwisata yang di ambil oleh pemerintah kabupaten lombk timur dalam membangun pariwisata pasca gempa di kecamatan sembalun, yang pertama dengan melakukan pendataan sebagai acuan dalam mengambil keputusan, memberikan penanganan trauma *healing* bagi korban bencana,melakukan pembangunan pariwisata

⁷ Arbert Nikolas Erari, dkk. 2018. Pembangunan pariwisata di pulau nau kabupaten waropen provinsi Papua.

⁸ Novena Ulita Nopitupulu. 2015. Strategi pemasaran pariwisata budaya Mentawai melalui produk kesenian muturuk.

juga fasilitas pendukung dan melakukan promosi pariwisata untuk membangun Kembali kepercayaan pengunjung. Hambatan yang di hadapi dalam pembangunan pariwisata meliputi kurangnya anggaran dana, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya menejmen destinasi.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hendri Setiawan (fakultas ilmu sosial dan ilmu politik) judul “*Strategi badan wisata daerah provinsi DIY dalam pembangunan pariwisata tahun 2004-2006*”. Hasil dari penelitian ini adalah Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pariwisata Daerah Propinsi DIY adalah keamanan dan keselamatan, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, globalisasi dan kemajuan teknologi dan otonomi daerah. Strategi yang dilaksanakan Badan Pariwisata Daerah Propinsi DIY adalah melakukan promosi ke daerah/negara lain serta melalui lembaga-lembaga pariwisata dunia, pengembangan SDM, pengembangan potensi obyek dan daya tarik wisata, optimalisasi peran serta dan kesadaran masyarakat, pembentukan kelompok sadar wisata, memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota, meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata sesuai skala prioritas.¹⁰

Dari beberapa penelitian diatas peneliti belum melihat adanya penelitian sebelumnya yang membahas tentang strategi pembangunan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Mentawai di bidang pariwisata. Objek pariwisata

⁹ Viki Priwijaya. 2022. Strategi pembangunan pariwisata pasca gempa di kecamatan Sembalun kabupaten Lombok Timur.

¹⁰ Hendri Setiawan. 2008. Strategi badan pariwisata daerah provinsi DIY fdalam pembangunan pariwisata tahun 2004-2006.

yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dikenal baik oleh masyarakat mancanegara maupun masyarakat daerah sendiri, ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk potensi sumber pendapatan daerah jika keberadaannya dikelola dengan baik, paling tidak untuk menarik minat wisatawan domestik. Untuk mengembangkan obyek wisata bahari di Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya tidak mudah karena sarana, prasarana pendukung dan sumber daya manusia pada umumnya masih terdapat hambatan sangat minim, jumlah armada transportasi laut dan udara dari Padang ke wilayah Mentawai sangat terbatas, Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal secara optimal, telekomunikasi sangat terbatas, tidak adanya penyelamatan armada dan lemahnya kepemilikan properti, hal inilah yang menjadi kendala dan hambatan yang bisa mempengaruhi upaya pengembangan dan pengelolaan secara optimal terhadap objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, oleh karena itu peran serta dari pihak swasta juga dibutuhkan untuk membantu kemajuan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kualitas SDM juga mempengaruhi majunya sektor pariwisata yang ada di Mentawai.

Adapun visi misi Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet-Kortanius Sabeleake periode 2017-2022 yaitu:

Visi

Mentawai yang mandiri, maju dan sejahtera

Misi

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.
2. Mewujudkan infrastuktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritime.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, bersih, akuntabel dan melayani.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Terkait dengan visi misi bupati Mentawai dapat dilihat bahwa, salah satu visi bupati mentawai adalah untuk mewujudkan infrastuktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan. Hal ini tentu berkaitan dengan pembangunan pariwisata yang ada di mentawai. Yudas mengatakan pada sisi infrastruktur, pembangunan jalan akan dikebut untuk memperlancar distribusi hasil pertanian seperti kelapa perikanan keruang pasang dan meningkatkan akses ke daerah wisata.

Kepulauan Mentawai tepatnya di Sikakap telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kawasan wisata bahari. Kondisi pesisir pantai, terumbu karang (coral reef) dan lautan dinilai memiliki potensi alam yang sangat potensial dan menarik untuk dikembangkan menjadi objek wisata bahari. Daya tarik pesisir, terumbu karang, dan kelautan inilah yang membuat pemerintah menjadikannya sebagai kawasan wisata bahari melalui SK Menti kelautan No.91/Kpts-97/VI/97. Kepulauan Sikakap memiliki pantai dan laut yang sangat indah, serta keberadaan taman nasional dan hutan hujan yang asri di kepulauan ini secara langsung mendukung berbagai kehidupan di pantai dan laut, termasuk sekor pariwisata.

Selama ini banyak turis yang datang untuk menikmati berbagai atraksi di wilayah pantai yang sangat terkesan akan keasrian hutan kepulauan Sikakap. Kepulauan Sikakap ini memiliki garis pantai sepanjang 412 km. Potensi kepulauan Sikakap adalah ombaknya yan berulang- ulang dan sangat sesuai untuk dijadikan tempat selancar air

(surfing). Menurut pengakuan dari para surfer yang pernah merasakan “cantiknya” ombak Mentawai yang terutama di kepulauan Sikakap, disebut-sebut sebagai tempat berselancar terbaik ketiga di dunia ini setelah kepulauan Hawaii dan Tahiti. Kepulauan Mentawai tercatat memiliki 400 titik selancar yang sering dijadikan lokasi berselancar oleh para surfer. Dari 400 titik selancar, 23 titik diantaranya memiliki ombak berkala internasional. Daerah tersebut tersebar antara lain di daerah Nyang-Nyang, KarangBarat, Karoniki, Pananggalat dan Mainuk (Pulau Siberut), Katiet Basua (Pulau Sipora) dan Sikakap (Pagai Utara).

Pada bulan-bulan musim gelombang, praktis kegiatan wisata bahari di kepulauan Sikakap tidak bisa berlangsung secara baik dan atau sangat terbatas. Pada musim gelombang sekitar bulan September sampai dengan bulan Januari setiap tahun umumnya kegiatan masyarakat nelayan di lautan praktis berhenti pula, seperti pelayaran, penangkapan ikan, mobilitas di kepulauan Sikakap. Kondisi arus dipengaruhi pula oleh kondisi musim atau angin, sehingga mempengaruhi kegiatan dan atau aktifitas mempengaruhi kegiatan dan atau kegiatan masyarakat nelayan dan wisatawan mancanegara maupun domestik. Dalam kondisi geografis demikian maka kegiatan wisata bahari praktis hanya bisa berlangsung 6 (enam) bulan dalam satu tahun. Kondisi ini memang berbeda dengan objek wisata bahari lainnya di Indonesia seperti Bali dan Manado (Bunaken) dimana kegiatan wisatanya bisa berlangsung sepanjang tahun. Pengaruh musim ini juga bisa berakibat pula terhadap semakin kecilnya dampak perkembangan pariwisata bahari terhadap kegiatan ekonomi masyarakat terumbu karang. Kondisi terumbu karang yang beranekaragam disertai kehidupan biota lainnya

serta pesisir pantai putih yang indah memang dimanfaatkan untuk kegiatan wisatabahari, seperti olah raga senam, snorkling, dan rekreasi pantai tetapi selama ini pantai di sini lebih banyak atau sering digunakan oleh wisatawan mancanegara.¹¹

Kecamatan Siberut Barat Daya ialah salah satu wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dikenal dengan objek wisata bahari, sehingga tidak heran kalau Siberut Barat Daya menjadi tempat keluar masuknya setiap pengunjung. Wisata bahari biasanya dikenal dengan keindahan alam yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu misalnya seperti keindahan pantai, ombak dan pulau-pulau yang menarik untuk dikunjungi. Sedangkan wisata budaya ialah suatu keunikan yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah tertentu dimana keunikan tersebut tidak dimiliki oleh daerah lain contohnya keunikan budaya Mentawai yang dimilikinya seperti tato, meruncingkan gigi, pakaian dari kulit kayu dan lain sebagainya, keunikan-keunikan tersebut tidak dapat ditemukan di daerah lain. Adapun wisata panora Siberut Barat Daya ialah tempat yang cocok bagi wisatawan penikmat matahari terbenam yang orang biasa sebut sunset. Menurut badan pusat statistik pada tahun 2018 objek wisata di Kecamatan Siberut Barat Daya tercatat sebanyak 40 objek wisata dan 35 diantaranya ialah wisata bahari, selebihnya wisata budaya, panorama alam, sumber air.¹²

Pantai Mapaddegat merupakan salah satu tempat wisata menarik yang terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di tahun 2017 yang lalu,

¹¹ Firdaus, dkk. 2012. Perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca pengembangan wisata bahari di kepulauan Sikakap, Kabupaten Mentawai. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume I Nomor 2, Juli-Desember 2012

¹² Murni, Hati. 2021. Motivasi Wisatawan Mancanegara Berkunjung Ke Pulau Ebay Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya. Diploma thesis. Universitas Andalas.

Pantai Mapaddegat sering diadakan acara-acara besar, seperti memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai, acara Festival Pesona Mentawai 2017, dan acara-acara lainnya. Selain itu, salah satu daya tarik dari wisata Pantai Mapaddegat adalah pasir putih yang indah dan air laut yang biru. Namun di Pantai Mapaddegat masih dibutuhkan fasilitas penunjang untuk kawasan tepi Pantai Mapaddegat agar menjadi kawasan wisata pantai yang lebih baik. Pantai Mapaddegat belum dikelola sepenuhnya sebagai destinasi wisata dan Pantai Mapaddegat belum tersedia fasilitas yang memadai. Di pantai Mapaddegat juga tidak ada fasilitas mandi bilas. Selama ini setelah mandi laut, wisatawan kesulitan mendapatkan air tawar untuk mandi bilas. Dengan demikian diperlukannya perhatian dari pemerintah agar membangun sarana dan prasarana penunjang, agar wisatawan lebih banyak lagi berkunjung ke Pantai Mapaddegat.¹³

Di desa Malakopa, Kecamatan Pagai Selatan, di sisi barat Pulau Pagai Selatan terdapat obyek wisata yang disebut pantai Pamintaijat yang berhadapan langsung dengan perairan Samudera Hindia dimana terdapat hamparan pasir putih yang luasnya sekitar 50-100 meter sepanjang 2 km. Uniknya, di kawasan pantai itu juga terdapat sebuah gua walet yang disebut Gua Pamintaijat dengan panjang 50 meter. Dinding batunya tegak lurus setinggi 20-40 meter memagari pantai yang penuh pesona. Di pedalaman Pulau Pagai Selatan tersimpan pesona alam lain. Salah satunya adalah Air Terjun Simatobat atau yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Air Terjun

¹³ Isbran, dkk. 2018. Perencanaan dan Perancangan Kawasan Kompleks Wisata Tepi Pantai Mapaddegat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Seminar Nasional Ilmu Terapan (SNITER). Universitas Widy Kartika B03-1.

Bungo Rayo. Ketinggian air terjun ini hanya 15 meter. Sepanjang aliran sungai yang mengarah ke hulu setidaknya ada lima air terjun lain dengan tinggi dan lebar bervariasi. Belum lagi adanya gua yang termasuk dalam kategori gua hidup di sekitar air terjun itu. Bangunan yang terbentuk dari stalaktit maupun stalakmit gua menjadi tempat berlindung burung walet maupun rusa. Sepanjang kawasan aliran sungai terdengar suara Bilou dan Bokoi, primata endemik Mentawai.¹⁴

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis sebagai wujud manifestasi visi dan misi kepala daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 merupakan arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Periode 2017-2022, Bapak Yudas Sabagalet, S.E., M.M dan Kortanius Sabeleake, S.Pt yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.¹⁵

Dalam Undang-Undang R1 No. 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan 7, tentang pembangunan pariwisata disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata (Pasal 6). Pembangunan pariwisata meliputi

¹⁴ Gilbert Tua. 2021. Penyuluhan Desa Ramah Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai Persiapan Menuju Desa Wisata Bahari dan Kampung Wisata yang Sehat dan Ramah Lingkungan. Universitas Kristen Indonesia. Webinar.

¹⁵ RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022

industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata (Pasal 7).¹⁶

Sektor pariwisata bahari Kepulauan Mentawai memiliki kedudukan yang strategis terhadap pembangunan nasional khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kondisi tersebut disebabkan adanya objek wisata yang potensial seperti wisata bahari dan wisata budaya, oleh karena itu diupayakan pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pariwisata mengalami perkembangan dikarenakan adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajah wilayah baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapatkan pengalaman baru.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa pembangunan sektor pariwisata menuntut kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya pengembangan pariwisata dimasa yang akan datang. Kesiapan yang dimaksud adalah dalam hal kelembagaan Organisasional dalam bentuk Dinas Pariwisata, sarana dan fasilitas pariwisata serta efektivitas pengembangan untuk masa yang akan datang. Pengembangan pariwisata harus dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, karena pegelolaan pariwisata dengan baik dapat memberikan kontribusi penting bagi negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi kedua terbesar setelah Jawa, memiliki potensi kewilayahan yang bernilai strategis. Potensi subur daya alam berupa perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, dan pariwisata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi laut

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

yang sangat besar. Salah satu kepulauan Indonesia yang terkenal keindahan pantainya adalah kepulauan Mentawai.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan destinasi wisata yang memiliki kekhasan sebagai potensi pariwisata budaya. Salah satu daerah yang masih memiliki suku pedalaman di dunia menjadikan daya tarik tersendiri bagi para peneliti nasional maupun mancanegara, kekhasan tersebut didukung pula dengan komoditas lainnya. Diantaranya beberapa sumber daya langka yang dimiliki Mentawai yakni : ombak pantai nomor lima di dunia dengan ketinggian 3 sampai 4 meter, jenis primata (kera), jenis tumbuhan yang 65% langka dan dijadikan obat-obatan, tata cara pengobatan dan penyembuhan orang sakit, proses pembuatan material dan teknik tattoo yang masih tradisional, shaman yang memiliki kekuatan magis yang dinamakan „sikerei“, sistem kehidupan dan mata pencaharian yang sangat tergantung dengan alam (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Mentawai, 2011 : 60-79).¹⁷

Potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai di atas menjadikan daerah tersebut telah dikenal baik secara nasional maupun internasional. Potensi alam dan keunikan budaya suku asli Mentawai yang masih ada keberadaannya sampai saat ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu destinasi wisata impian bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Keindahan ombak dan pantai Mentawai merupakan tujuan para peselancar dunia untuk menaklukkannya sebagai olahraga yang penuh tantangan. Serta didukung juga dengan keberadaan kebudayaan

¹⁷ Novena Ulita Nopitupulu. 2015. Strategi pemasaran pariwisata budaya Mentawai melalui produk kesenian muturuk.

suku Mentawai yang menambah daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Upaya meningkatkan permintaan angka kunjungan wisatawan pariwisata budaya ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemerintah daerah membutuhkan suatu kebijakan yang mengarah pada manajemen pemasaran. Harapannya melalui manajemen pemasaran itu dapat memberikan strategi dalam pengelolaan demi meningkatkan permintaan kunjungan pada pariwisata budayatersebut.

Maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu dari program manajemen pemasaran telah mengupayakan promosi atraksi pariwisata budaya di daerah melalui media-media internet maupun media cetak yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya di tingkat nasional adanya liputan pada Kompas Travel dan Indonesia Travel semakin memperkenalkan budaya daerah tersebut bagi wisatawan yang datang ke Indonesia. Publikasi melalui media tersebut menjadikan pariwisata budaya Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin dikenal dimasyarakat dunia khususnya.

Ada beberapa permasalahan yang muncul sebagai suatu kawasan pariwisata sehingga mendorong pemerintah daerah membutuhkan suatu strategi pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berkaitan dengan pengembangan akan mengacu pula pada pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber

dana dengan demikian sangat dibutuhkannya juga suatu strategi pemasaran demi meningkatkan permintaan pariwisata budaya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.¹⁸

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah pendapatan asli daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan atau daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi. Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan akses/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini. Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.

¹⁸ Napitupulu Novena Ulita. Strategi Pemasaran Pariwisata Budaya Mentawai Melalui Produk Kesenian Muturuk. Universitas Mercu Buana Jakarta. *Jurnal Desain & Seni, FDSK-UMB*.

1.2 Rumusan Masalah

Kepulauan Mentawai adalah nama sebuah Kabupaten yang secara administratif masuk ke wilayah Propinsi Sumatera Barat, Pulau Mentawai terletak 150 kilo meter dilepas pantai pulau Sumatera. Kabupaten Mentawai dengan Ibu Kota Tuapejat memiliki luas wilayah lebih dari 6.000 kilo meter persegi, Terdiri dari 4 Kecamatan dan 40 Desa dengan jumlah penduduk 65.000 jiwa lebih sebagian besar penduduk yang mendiami pulau ini adalah masyarakat suku asli Mentawai.

Pulau Mentawai terdapat 4 pulau utama yaitu Pulau Sipora, Pagai Utara, Pagai Selatan dan Siberut yang menjadi tujuan wisatawan dan masih banyak lagi pulau pulau kecil tercatat ada 213 pulau, wilayah daratan kepulauan sebagian besar masih berupa hutan rimba alami karena memiliki sejarah geologis yang cukup lama sejak zaman dahulu, maka hutan di pulau ini masih memiliki binatang khas dan dilindungi tercatat ada 20 lebih jenis binatang yang hidup di pulau ini.

Mentawai belakangan ini cukup menarik orang-orang dalam dan luar negeri. Terutama setelah Mentawai menjadi kabupaten terbungsu di propinsi Sumatera Barat. Banyak pelancong datang ke pulau-pulau tepi barat tersebut. Secara alami, kepulauan Mentawai seakan-akan ditempatkan sebagai gugusan pulau penyangga dari hampasan gelombang laut Samudera Hindia dan Samudera Indonesia terhadap pantai barat pulau Sumatera. Secara geografis letaknya mengunungkan sekali. Kepulauan ini juga diakui sangat strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan Afrika Timur, Madagaskar dan negara-negara Asia Selatan seperti Yaman, Sriangka, India dan Myanmar, begitu juga dengan kepulauan Andamar dan Nikobar. Mentawai adalah satu

gugusan kepulauan yang membujur dari utara ke selatan sepanjang pantai barat Sumatera Barat, dari Air Bangis hingga mendekati provinsi Bengkulu.

Wilayah perairan kabupaten ini telah dipromosikan dan masuk ke dalam Indonesian *marine tourism destination* oleh menteri pariwisata. Hal ini didasari atas kenyataan bahwa perairan ini memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa (terumbu karang, ombak yang membentuk gula, pantai yang indah) yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Perhatian pemerintah kabupaten kepulauan Mentawai telah terfokus pada pengembangan sektor wisata bahari, sesuai dengan sektor unggulan dari perencanaan pembangunan.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, hanya memprioritaskan 4 sektor pembangunan ekonomi Sumatera Barat periode 2016-2020, yakni pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan dan pariwisata. Prioritas pembangunan ekonomi periode ini sama dengan periode 2010-2015 karena 4 sektor tersebut yang mendominasi kegiatan ekonomi di Sumatera Barat selama ini.¹⁹ Pada periode ini, pembangunan 4 (empat) sektor tersebut akan dilanjutkan dan disempurnakan. Bedanya, sektor pariwisata mendapatkan perhatian lebih dari 3 sektor lainnya. Kepala Bappeda Sumatera Barat, menyatakan, sektor pariwisata, berkontribusi lebih banyak untuk gerakkan ekonomi karena pariwisata banyak keterkaitannya, seperti mendorong peningkatan industri-industri cenderamata, makanan, transportasi, komunikasi, penginapan, dan sebagainya.

¹⁹ Arliman laurensius. 2018. Peran investasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi bidang pariwisata di provinsi Sumatera Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018), pp. 273-294.

Pada saat ini di beberapa lokasi dari kabupaten ini telah dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai lokasi selancar, karena memiliki ombak yang cukup besar. Namun sarana dan prasarana dan sumber daya manusia masih terbatas, untuk menonjolkan dan menopang kegiatan wisata secara maksimal. Data yang tersedia dari kawasan tersebut belum memadai, sehingga pendayagunaan potensi pesisir kabupaten kepulauan Mentawai berikut sumberdaya secara optimal dan lestari, maka perlu dilakukan kajian tentang alternatif jenis wisata bahari selain selancar, seperti wisata pantai, wisata alam dan snorking, wisata pemancingan dan lainnya.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik.

Untuk pengembangan pariwisata tentu akan memerlukan pembangunan infrastruktur agar wisatawan lebih banyak yang datang ke daerah destinasi wisata. Dengan kekayaan keindahan alam dan budayanya, Sumatera Barat memang sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan wisata, baik wisata gunung, bahari maupun eco tourism. Berbagai even international yang pernah digelar adalah International Peace Walk dan Women Walk yang melibatkan lebih dari 400 orang wisatawan mancanegara dan klub jalan kaki dunia dari sekitar 22 negara, dan lomba Surfing International yang

akan diselenggarakan di Mentawai tepatnya di Pulau Siberut Mentawai. Sayangnya, keindahan alam kawasan yang merupakan perpaduan, lembah, danau dan pantai dengan budaya yang unik ini belum dikelola secara baik sehingga industri pariwisata nyaris tidak berkembang. Padahal, dengan sentuhan infrastruktur pariwisata dan promosi yang memadai diperkirakan daerah ini tidak akan kalah dengan Bali.²⁰

Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan terhadap penggunaan teknologi menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumber daya yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Alat komunikasi sudah merupakan bagian inti (*inherent*) terhadap produk pariwisata, sehingga keterbatasan alat komunikasi tentu menghambat proses pengembangan pariwisata di Mentawai. rendahnya kepedulian pemerintah daerah, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia juga menjadi masalah yang ada di Pemerintahan Mentawai. Mengingat Pariwisata di Mentawai terfokus pada daerah laut dan hutan alam, jadi para wisatawan menghadapi banyak tantangan alam.²¹

Dalam sisi lain perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata di Mentawai masih mengandalkan pada instansi pemerintah dan swasta, sehingga tentunya manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dan swasta, sedangkan kondisi masyarakat sekitar sendiri, yang masih minus dari segi ekonominya, perlu ditingkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini terjadi, karena pemerintah masih menganggap kesiapan

²⁰ Arliman laurensius. 2018. Peran investasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi bidang pariwisata di provinsi Sumatera Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018), pp. 273-294.

²¹ Jufri Yenni, dkk. 2019. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di desa Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

sumber daya manusia masyarakat lokal belum mampu mengelola wisata alam secara mandiri dan professional, sehingga pemberdayaan masyarakat lokal dalam industri wisata alam diawali dengan program pembinaan, penyuluhan, pendampingan, dan bimbingan pada masyarakat lokal. Peran serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan dan pengelolaannya.²²

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 Oktober 2022, peneliti melihat bahwa pariwisata yang dimiliki oleh Mentawai sudah ada, akan tetapi masyarakat belum menyadari potensi yang dimiliki, pembangunan juga belum dilaksanakan dengan baik dan kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana. Untuk bisa menyelamatkan mereka yang mengalami masalah dengan alam diperlukan alat komunikasi yang canggih. Terbatasnya alat komunikasi di Mentawai sangat mengganggu pengembangan pariwisata di wilayah Mentawai. Tidak adanya armada rescue, baik yang berupa tenaga manusia ataupun peralatannya yang layak untuk mengatasi peristiwa kecelakaan di aktivitas selancar ataupun wisata alam hutan serta budaya di wilayah yang sulit dijangkau. Keamanan wisatawan telah menjadi bagian penting dan tidak dapat terpisahkan dengan layanan pariwisata. Sebelum tahun 2017 di dalam RPJMD Kabupaten Mentawai belum membahas tentang pariwisata artinya belum adanya campur tangan dari pemerintah mengenai pembangunan pariwisata. Kepemilikan resort pun yang ada di pemerintahan Mentawai atas nama pribadi bukan atas nama pemerintahan Mentawai. pada tahun 2017 baru ada campur tangan pemerintah

²² Helmawati, dkk. 2021. Analisis pengembangan sektor pariwisata kecamatan siberut Barat Daya Kabupaten kepulauan mentawai sebagai destinasi unggulan di Sumbar. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

mengenai pariwisata dan menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi bupati Mentawai.²³

Pemerintah Daerah belum optimal dalam mengupayakan potensi wisata bahari yang sangat besar, dalam hal ini belum terdapat sebuah regulasi. Tak hanya menjadi jaminan namun juga akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengeluarkan bermacam bentuk kebijakan pada perencanaan pembangunan daerah sektor kepariwisataan tak terkecuali dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah wisata bahari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 terdapat sejumlah 194 objek wisata yang berlokasi di 10 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan potensi yang dikembangkan antara lain; 22 objek wisata panorama alam, 150 objek wisata bahari, 9 objek wisata sumber air, dan 13 objek wisata budaya.²⁴

Jenis objek wisata bahari secara umum lebih mendominasi, oleh sebab itu salah satu subsektor pariwisata yang mendapatkan perhatian serius dan pengelolaan yang baik ialah wisata bahari, yang sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk mencipkatakan kemajuan daerah Mentawai. Selama ini, wisata jenis inilah yang paling digemari wisatawan mancanegara. Aktivitas yang bisa dilakukan diantaranya menyelam, wisata pantai, berlayar, selancar, berenang, pesiar dan memancing. Selama ini banyak turis yang datang untuk menikmati berbagai atraksi di wilayah pantai yang sangat terkesan

²³ Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

²⁴ Murti Sari Dewi. 2020. Perancangan sistem informasi dan pemasaran pariwisata sebagai media promosi pada kabupaten kepulauan Mentawai berbasis web.

akan keasrian hutan kepulauan Sikakap. Kepulauan Sikakap ini memiliki garis pantai sepanjang 412 km. Potensi kepulauan Sikakap adalah ombaknya yang berulang-ulang dan sangat sesuai untuk dijadikan tempat selancar air (surfing). Dengan adanya pembangunan pariwisata tentu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten kepulauan Mentawai.²⁵

Tabel 1.2
Target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pariwisata kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2017-2022

Tahun	Target APBD	Realisasi
2017	3.920.000.000	2.647.327.991
2018	8.000.000.000	8.182.100.0000
2019	11.150.000.000	6.614.850.000
2020	800.000.000	122.680.000
2021	9.000.000.000	858.700.000
2022	3.008.000.000	2.972.100.000

Sumber : BPS Mentawai tahun 2017-2022

Asumsi dari penelitian ini adalah strategi pembangunan pariwisata di Mentawai belum berjalan dengan baik, pemerintah daerah juga belum maksimal mengupayakan potensi bahari yang sangat besar, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat Mentawai mengenai potensi yang dimiliki, terutama di bidang Pariwisata juga menjadi masalah dalam pembangunan pariwisata di Mentawai. Untuk itu peneliti berfokus kepada strategi yang diambil oleh pemerintah Kepulauan Mentawai mengenai pembangunan

²⁵ Andriyani Ismi dkk. 2012. Perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca pengembangan wisata bahari di kepulauan Sikakap, kabupaten Mentawai.

dibidang pariwisata. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan “Bagaimana Strategi Pembangunan Kepariwisata di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2017-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Strategi Pembangunan Kepariwisata di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan strategi pembangunan kepariwisataan di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2017-2022.

1.4.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada penulis dan pemerintahan sehingga dapat mengetahui strategi pembangunan kepariwisataan di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2017-2022.